PERAN BADAN KESBANGPOL DALAM MENINGKATKAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

Nazim Muhafiz Haq
NPP. 33.0464
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: nmuhafizhaq@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si
Email: gasperliauw@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP)*: As a city with a high level of diversity, Semarang faces challenges in maintaining interfaith harmony. The role of the local government is crucial in creating a harmonious social condition amid these differences. The National Unity and Political Agency (Kesbangpol) as one of the regional government institutions has the responsibility to maintain social stability, including improving interfaith harmony.* ***Purpose:*** *This study aims to identify and analyze the role of Kesbangpol of Semarang City in enhancing interfaith harmony, as well as to determine the inhibiting factors and the efforts made to overcome these obstacles.* ***Method:*** *The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques including interviews and documentation obtained from Kesbangpol, the Forum for Religious Harmony (FKUB), religious leaders, and the community. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The results show that Kesbangpol of Semarang City has performed its roles as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst through policy formulation, implementation of socialization and interfaith dialogue, facilitation of FKUB activities, and strengthening cross-sector collaboration. However, there are still obstacles in its implementation, namely low community participation caused by busy schedules, time constraints, and lack of awareness regarding harmony issues. To overcome these challenges, Kesbangpol has made various efforts such as conducting flexible and adaptive socialization, utilizing social media, and involving community leaders and grassroots institutions at the RT/RW level.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the role of Kesbangpol in improving interfaith harmony in Semarang City has been carried out quite well, this is due to the good collaboration between the kesbangpol agency, FKUB, community organizations, and other agencies as well as the implementation of programs that are fairly even and routine.*
Keywords: *FKUB, Government Role, Interfaith Harmony, Kesbangpol, Tolerance,*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Sebagai kota yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, Kota Semarang dihadapkan pada tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menciptakan kondisi sosial yang harmonis di tengah perbedaan tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai salah satu

perangkat daerah memiliki tanggungjawab dalam menjaga stabilitas sosial, termasuk dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kesbangpol Kota Semarang dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak Kesbangpol, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol Kota Semarang telah menjalankan perannya sebagai *regulator*, *dinamisator, fasilitator, dan katalisator* melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan sosialisasi dan dialog lintas agama, fasilitasi kegiatan FKUB, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kesibukan, keterbatasan waktu, serta kurangnya kepedulian terhadap isu kerukunan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kesbangpol melakukan berbagai upaya seperti pelaksanaan sosialisasi yang fleksibel dan adaptif, pemanfaatan media sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat dan kelembagaan hingga tingkat RT/RW. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kesbangpol dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Semarang telah berjalan cukup baik, hal ini dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antara badan kesbangpol, FKUB, ormas, dan instansi lainnya serta pelaksanaan program yang cukup merata dan rutin dilakukan.
Kata kunci: FKUB, Kesbangpol, Kerukunan Antarumat Beragama, Peran Pemerintah, Toleransi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, ras, dan agama terbesar di dunia, hal ini dapat dibuktikan dari kondisi sosiokultur maupun wilayah Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas (Setiawan et al., 2022). Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Keberagaman itu juga dapat menjadi sebuah tantangan yang berpotensi memberikan ancaman terhadap persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia (Sealy, 2022). Indonesia termasuk salah satu negara dengan keberagaman agama terbesar dengan jumlah masyarakat lebih dari 282 juta orang. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sekitar 245 juta orang, diikuti oleh Kristen Protestan sekitar 20 juta orang, Katolik sekitar 8 juta orang, Hindu sekitar 4 juta orang, Buddha sekita 2 juta orang, dan Konghucu sekitar 76 ribu orang (Oktavia, 2024). Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta orang dan memiliki tingkat heterogenitas masyarakat yang cukup tinggi sehingga memerlukan upaya yang serius dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Kerukunan antarumat beragama merupakan kondisi hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan saling menghargai antar pemeluk agama. Kerukunan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat (Modood, 2019). Dalam konteks pemerintahan daerah, upaya menjaga kerukunan antarumat beragama menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah (Modood & Sealy, 2025). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki tugas dalam menjaga stabilitas nasional, ketahanan sosial, serta penanganan

konflik sosial di masyarakat. Kesbangpol juga berperan dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kota Semarang termasuk kota dengan tingkat toleransi yang cukup baik, namun masih terdapat tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerukunan, potensi intoleransi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah yang optimal dalam menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis (Balagangadhara & Roover, 2007).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian mengenai peran pemerintah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan umat beragama telah banyak dilakukan Yohanes et al. (2023) meneliti peran Kesbangpol dalam merawat kerukunan masyarakat di Kabupaten Sintang dengan fokus pada peran efektif, keseimbangan, dan adaptif. Pamungkas, P. C. et al. (2024) mengkaji upaya Kesbangpol Kota Bekasi dalam penguatan kerukunan beragama melalui edukasi, fasilitasi, dan sosialisasi., Kurniawan (2017) meneliti peran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai fasilitator, koordinator, dan regulator dalam memelihara kerukunan umat beragama. Penelitian Hatapoyo (2025) yang berjudul Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sorong yang berisi peran kesbangpol melalui pendekatan dialogis, kolaboratif, dan prevensif. Penelitian Makalew et al. (2021) yang berjudul Koordinasi antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota mengkaji terkait kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dengan FKUB dalam menciptakan kerukunan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah menjelaskan berbagai bentuk peran pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, secara teoritis penelitian terdahulu belum banyak menggunakan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang membagi peran pemerintah ke dalam fungsi r*egulator, dinamisator, fasilitator,* dan *katalisator* secara komprehensif. Kedua, secara empiris penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada upaya menjaga stabilitas sosial dan pelaksanaan program kerukunan tanpa mengaitkannya dengan indikator-indikator keberhasilan toleransi yang terukur.

Ketiga, penelitian terdahulu belum mengkaji secara spesifik hubungan antara pelaksanaan peran Kesbangpol dengan indikator Indeks Kota Toleran (IKT) yang digunakan oleh SETARA Institute sebagai instrumen penilaian toleransi daerah. Padahal IKT merupakan salah satu instrumen yang mampu menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam mengelola keberagaman dan menjaga kerukunan masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini menempatkan diri untuk mengisi kekosongan penelitian dengan menganalisis peran Badan Kesbangpol Kota Semarang menggunakan perspektif teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid serta mengaitkannya dengan kondisi kerukunan umat beragama yang tercermin dalam indikator Indeks Kota Toleran. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya menjelaskan program yang dilaksanakan Kesbangpol, tetapi juga menjelaskan bagaimana fungsi *regulator, dinamisator, fasilitator,* dan *katalisator* dijalankan dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat untuk memberikan gambaran mengenai peran badan kesbangpol dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Semarang dan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan yang diinisiasi oleh badan kesbangpol. Pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 disebutkan disalah satu misinya dan disalah satu 50 program prioritasnya yaitu "Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian" dan "Melindungi dan menjamin semua kelompok agama dan budaya untuk bebas menjalankan ibadah dan praktek budayanya sesuai dengan ideologi Pancasila". Masalah kerukunan antarumat beragama ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk membantu pemerintah Kota Semarang untuk mengelola masalah kerukunan antarumat beragama di Kota Semarang serta membantu agar bisa meraih peringkat satu pada penilaian Indeks Kota Toleran pada tahun berikutnya.

1.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan lima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya peran pemerintah daerah dan Badan Kesbangpol dalam menjaga kerukunan masyarakat melalui pendekatan dialog, koordinasi, fasilitasi, serta pencegahan konflik sosial.

Namun demikian terdapat beberapa perbedaan. Penelitian Yohanes et al. (2023) lebih menekankan efektivitas peran Kesbangpol dalam menjaga kerukunan masyarakat secara umum. Penelitian Pamungkas et al. (2024) berfokus pada upaya penguatan kerukunan beragama melalui edukasi dan fasilitasi. Penelitian Kurniawan (2017) menitikberatkan pada peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, koordinator, dan regulator. Penelitian Hatapoyo (2025) lebih menekankan stabilitas sosial melalui pendekatan preventif dan kolaboratif. Sementara penelitian Makalew et al. (2021) berfokus pada koordinasi pemerintah dan FKUB.

Keterbatasan penelitian terdahulu adalah belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis peran Badan Kesbangpol menggunakan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid serta menghubungkannya dengan indikator Indeks Kota Toleran sebagai ukuran empiris keberhasilan pengelolaan kerukunan umat beragama.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah melengkapi penelitian terdahulu dengan mengkaji secara komprehensif peran Kesbangpol Kota Semarang sebagai *regulator, dinamisator, fasilitator,* dan *katalisator* dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama serta mengaitkannya dengan dinamika toleransi yang tercermin dalam capaian Indeks Kota Toleran Kota Semarang.

.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada aspek teoritis, yaitu penggunaan teori peran pemerintah menurut Rasyid (1999) yang mengintegrasikan fungsi *regulator, dinamisator, fasilitator,* dan *katalisator* untuk menganalisis peran Kesbangpol dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Pada aspek konseptual, yaitu pengaitan antara teori peran pemerintah dengan indikator Indeks Kota Toleran sebagai instrumen untuk memahami kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan keberagaman dan toleransi masyarakat.

Pada aspek empiris, yaitu ditemukannya fakta bahwa keberhasilan peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Semarang tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, tetapi juga

oleh kemampuan Kesbangpol membangun kolaborasi antara FKUB, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan masyarakat hingga tingkat RT/RW. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi fungsi *katalisator* pemerintah dalam konteks pengelolaan keberagaman masyarakat perkotaan.

1.6 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran badan kesbangpol dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Semarang.

II. METODE

Penelitian merupakan metode untuk menyelesaikan suatu permasalah dan menemukan jawaban dari suatu persoalan (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian dan memahami secara mendalam alasan, proses, dan dinamika keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap peran badan kesbangpol dan partisipasi masyarakat yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu jenis data.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 14 informan yang dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling* menurut Simangunsong (2016) yang sesuai dengan peran, kriteria, dan keterlibatannya (Liauw, 2015). Informan tersebut terdiri dari kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan dan pengambil keputusan utama dalam program, kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat, ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta enam orang tokoh agama, dan lima orang masyarakat. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah, pelaksana, dan pemuda), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) menurut Miles and Huberman dalam Zulfirman (2022), serta memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit trail berupa pencatatan proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesbangpol Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan peran badan kesbangpol dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Semarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penulis menganalisis peran badan kesbangpol dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kota Semarang menggunakan teori peran Ryaas Rasyid dengan empat dimensi utama, yaitu *regulator, dinamisator, fasilitator, katalisator*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. *Regulator*

Regulator adalah peran pemerintah dalam menetapkan produk hukum, mengatur, dan mengendalikan kebijakan serta peraturan guna menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Dimensi *regulator* dibagi menjadi tiga indikator, yaitu adanya kebijakan terkait kerukunan antarumat beragama, regulasi non-diskriminatif, dan fasilitasi aturan rumah ibadah.

Pada indikator adanya kebijakan terkait kerukunan antarumat beragama merupakan tahap awal untuk menentukan arah, tujuan, serta strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang dikatakan oleh kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, bapak Dr. Bambang Pramusintho, S.H., S.IP, M.Si., yaitu "Pembuatan kebijakan yang promotif merupakan tugas pemerintah sebagai langkah awal untuk menciptakan keadaan di masyarakat yang adil dan sejahtera".

Pada indikator regulasi non-diskriminatif merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah tanpa membedakan perlakuan terhadap kelompok masyarakat berdasarkan agama seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, bapak Dr. Bambang Pramusintho, S.H., S.IP, M.Si. dalam wawancara yang mengatakan bahwa "Untuk di Kota Semarang tidak ada kebijakan yang diskriminatif dan dampak yang mungkin terjadi kalau ada kebijakan yang diskriminatif mungkin akan sering terjadi konflik dan keributan".

Pada indikator fasilitasi aturan rumah ibadah berkaitan dengan langkah pemerintah dalam memastikan proses pendirian rumah ibadah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat yaitu dengan membuat Perwal No.46 Tahun 2021 tentang tata cara mendirikan rumah ibadah yang berpedoman pada peraturan pusat dan kami menyediakan fasilitas lainnya.

3.2. *Dinamisator*

Dinamisator berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan motivasi, pembinaan, dan dorongan kepada masyarakat agar aktif menjaga kerukunan antarumat beragama. Kesbangpol Kota Semarang berperan sebagai penggerak dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, dialog, serta pembinaan (Wasistiono, 2021). Dimensi *dinamisator* dibagi menjadi 2, yaitu pembinaan dan motivasi, keterlibatan masyarakat.

Pada indikator pembinaan dan motivasi berperan meningkatkan kerukunan antarumat beragama melalui kegiatan sosialisasi, dialog lintas agama, serta pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, bapak Agung Nurul Falaq Adi Wibowo, SE., M.A.P, yang mengatakan bahwa "Kesbangpol selalu memberikan sosialisasi, pertemuan dialog, dan edukasi lewat sosial media agar masyarakat manjaga kerukunan serta mengajak tokoh agama agar membantu mengedukasi masyarakat sebagai contoh teladan yang baik".

Pada indikator keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam dimensi *dinamisator,* yang menunjukkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung dan melihat sejauh mana kepedulian masyarakat dalam upaya peningkatan kerukunan antarumat beragama

3.3. *Fasilitator*

Dimensi *fasilitator* berkaitan dengan peran badan kesbangpol dalam menyediakan sarana, dukungan, dan pelayanan yang mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama (Labolo, 2006). Pada dimensi ini dibagi menjadi 3, yaitu fasilitasi kegiatan FKUB, respon konflik, dan dukungan kegiatan kerukunan.

Pada indikator fasilitasi kegiatan FKUB berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan dukungan yang diperlukan agar kegiatan FKUB dapat berjalan secara optimal seperti hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, bapak Dr. Bambang Pramusintho, S.H., S.IP, M.Si. dalam wawancara yang mengatakan bahwa "Pemerintah selalu memberikan dukungan kepada organisasi yang legal seperti FKUB baik secara moral, fasilitasi, dan finansial seperti mendapatkan dana hibah 800jt ditahun kemarin untuk FKUB".

Pada indikator respon konflik berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menangani, meredam, serta menyelesaikan konflik yang berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat. Hal tersebut juga disebutkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, bapak Dr. Bambang Pramusintho, S.H., S.IP, M.Si. dalam wawancara yang mengatakan bahwa "Badan Kesbangpol bekerja sama dengan FKUB, ormas keagamaan untuk membantu mengurangi konflik dan untuk strategi mungkin ada lebih banyak lagi sosialisasi serta kegiatan keagamaan bersama untuk mempererat perbedaan".

Pada indikator dukungan kegiatan kerukunan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan bantuan, kemudahan, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat hubungan antarumat beragama. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, bapak Agung Nurul Falaq Adi Wibowo, SE., M.A.P, yang mengatakan bahwa "Kesbangpol memberikan dukungan berupa izin melaksanakan kegiatan, sarana, narasumber, dan bantuan konsumsi dengan cara membuat proposal bantuan ke kantor Kesbangpol".

3.4 *Katalisator*

Dimensi *katalisator* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya perubahan sosial melalui inovasi dan kolaborasi. Dalam penelitian ini, Kesbangpol Kota Semarang berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak, seperti masyarakat, tokoh agama, dan lembaga terkait, guna memperkuat sinergi dalam menjaga toleransi. Dimensi ini dibagi menjadi 2, yaitu kolaborasi dan penguatan jaringan lintas sektor.

Pada indikator kolaborasi berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam membangun kerja sama dan sinergi antara berbagai pihak guna mempercepat terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, bapak Agung Nurul Falaq Adi Wibowo, SE., M.A.P, yang mengatakan bahwa 'Kesbangpol bekerjasama dengan pihak lain dengan cara membangun hubungan yang baik, komunikasi, dan saling bekerjasama untuk membangun negara ini menjadi lebih baik, membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, dan menciptakan kerukunan'.

Pada indikator penguatan jaringan lintas sektor berkaitan dengan upaya membangun, memperluas, dan mempererat hubungan antar berbagai pihak agar kerja sama dapat berjalan lebih efektif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, bapak Agung Nurul Falaq Adi Wibowo, SE., M.A.P, yang mengatakan bahwa 'Menurut saya memperkuat atau menjalin jaringan dan kerjasama

dengan pihak lain adalah untuk menjaga, menambah, serta memperkuat sinergitas dari berbagai unsur untuk menjaga kesatuan, memudahkan, dan merespon cepat permasalahan- permasalahan yang ada di masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Kesbangpol Kota Semarang tidak hanya sebatas pelaksana program kerukunan, tetapi juga sebagai aktor penghubung berbagai pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hatapoyo (2025) dan Pamungkas et al. (2024) yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama. Namun penelitian ini menemukan aspek yang berbeda, yaitu keberhasilan menjaga kerukunan di Kota Semarang didukung oleh kombinasi empat fungsi pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang berjalan secara simultan. Fungsi *regulator* diwujudkan melalui kebijakan dan koordinasi, fungsi *dinamisator* melalui sosialisasi dan dialog lintas agama, fungsi *fasilitator* melalui dukungan terhadap FKUB, dan fungsi *katalisator* melalui pembangunan jejaring kolaboratif antaraktor.

Temuan ini memperkuat teori Ryaas Rasyid bahwa efektivitas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial tidak bergantung pada satu fungsi tertentu, melainkan pada keterpaduan seluruh fungsi pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program yang diinisiasi oleh badan kesbangpol ini yakni kesibukan para masyarakat dan tingkat kesadaran yang masih rendah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Semarang telah menjalankan perannya sebagai *regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator* dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan dialog dan sosialisasi, fasilitasi kegiatan FKUB, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Meskipun demikian masih terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan waktu masyarakat, dan belum meratanya kepedulian terhadap isu kerukunan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti belum dapat melakukan pengamatan dalam jangka panjang terhadap seluruh program kerukunan yang dilaksanakan Kesbangpol Kota Semarang. Kedua, jumlah informan penelitian masih terbatas pada pihak Kesbangpol, FKUB, tokoh agama, dan beberapa unsur masyarakat sehingga belum sepenuhnya mewakili seluruh kelompok agama yang ada di Kota Semarang. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena dan tidak mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Keempat, penelitian hanya dilakukan pada Kota Semarang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah yang memiliki karakteristik sosial dan tingkat keberagaman yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan peran badan kesbangpol untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang beserta jajarannya, ketua FKUB Kota Semarang, tokoh agama, masyarakat Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Balagangadhara, S., & Roover, J. (2007). The Secular State and Religious Conflict. *Political Philosophy*, *15*(1), 67–92. https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2007.00268.x

Hatapayo, N. (2025). Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong. *Indonesian Journal of Law*, *2*(8), 146–160. https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1427

Kurniawan, H. (2017). *Peranan pemerintah Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama* [Universitas Negeri Yogyakarta]. https://eprints.uny.ac.id/53167/5/Ringkasan Skripsi 13401241032.pdf

Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Rajagrafindo Persada.

Liauw, G. (2015). *Administrasi pembangunan: studi kajian PKL*. Refika Aditama.

Makalew, M., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, *1*(1), 1–9. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34304

Modood, T. (2019). *Secularism and the governance of religious diversity*; GREASE Deliverable, Issue 770640). https://grease.eui.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/GREASE_D1.1_Modood-Sealy_Final1.pdf

Modood, T., & Sealy, T. (2025). The governance of religious diversity. *Ethnicities*, *25*(5), 762–769. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14687968251353686

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Oktavia, E. (2024). *Jumlah Penduduk Indonesia 2024 Berdasarkan Agama*. Kementrian Dalam Negeri. https://dataloka.id/humaniora/2027/jumlah-penduduk-indonesia-2024-berdasarkan-agama/

Pamungkas, P. C., Atthahara, H., & Resmana, S. (2024). Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penguatan Kerukunan Beragama Di Kota Bekasi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(4), 6783–6790. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/30795

Rasyid, R. (1999). *Makna Pemerintahan*. PT Yarsif Watampone.

Sealy, T. (2022). Developing a framework for a global comparative analysis of the governance of religious diversity. *Religion, State & Society*, *50*(4), 362–377. https://doi.org/10.1080/09637494.2022.2117526

Setiawan, T., Tjandraningtyas, J. M., Maria, C., Rahmani, K., Indrianie, E., Puspitasari, I., & Dwijayanthy, M. (2022). Memory of conflicts and perceived threat as relevant mediators of interreligious conflicts. *Religions*, *13*(3), 1–20. https://doi.org/10.3390/rel13030250

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintah*. ALFABETA, CV.

Wasistiono, S. (2021). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka.

Yohanes, Rochmawati, I., & Juliana, A. (2023). Analisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merawat kerukunan masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *9*(2), 117–123. https://doi.org/10.21776/ub.jiap/2023.009.02.9

Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Penelitian, Pendidikan, Dan Pengajaran*, *3*(2), 147–152. https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758